

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas terselenggaranya jasa konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam pekerjaan konstruksi berupa pemenuhan terhadap standar mutu bahan, standar mutu peralatan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, standar operasi dan pemeliharaan, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi dan standar pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang telah dijelaskan dalam peraturan pemerintah (PP) No. 22 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi pada pasal 123 Ayat (2). Disamping itu sasaran dari pekerjaan konstruksi juga melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dan orang lainnya di tempat kerja konstruksi, menjamin setiap material dan alat konstruksi digunakan dengan selamat, sehat, efisien, dan efektif, menjamin proses konstruksi berjalan lancar serta menjamin produk konstruksi dapat digunakan, dirawat, dan dibongkar dengan selamat dan efisien.

Pekerjaan sektor konstruksi merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan nasional yang memiliki peran penting dalam penyediaan infrastruktur, termasuk pembangunan sarana pengendalian banjir. Namun demikian, sektor ini juga dikenal sebagai salah satu sektor dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Kompleksitas pekerjaan konstruksi yang melibatkan penggunaan alat berat, pekerjaan di area terbuka, kondisi lingkungan yang dinamis, serta keterlibatan banyak tenaga kerja dengan latar belakang kompetensi yang beragam menjadi faktor utama tingginya potensi bahaya di lapangan. Kecelakaan kerja pada proyek konstruksi tidak hanya berdampak pada kerugian materiil, tetapi juga dapat menimbulkan korban jiwa, menurunkan produktivitas, serta merusak citra perusahaan.

Oleh karena itu, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi suatu keharusan dalam setiap kegiatan konstruksi. Pemerintah Indonesia melalui berbagai

regulasi telah mewajibkan penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) sebagai upaya sistematis dalam mengendalikan risiko keselamatan kerja. Sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) merupakan suatu pendekatan terintegrasi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta tindakan perbaikan secara berkelanjutan. Penerapan SMKK bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan konstruksi dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan, sehingga dapat meminimalisir potensi kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Proyek pembangunan pengendalian banjir Batang Agam kota Payakumbuh (tahap II) merupakan salah satu proyek infrastruktur yang memiliki tingkat kompleksitas dan risiko yang cukup tinggi. Pekerjaan yang melibatkan penggalian tanah, pembangunan struktur pengendali air, serta aktivitas di sekitar aliran sungai memiliki potensi bahaya seperti longsor, tenggelam, kecelakaan alat berat, dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Oleh karena itu, penerapan SMKK pada proyek ini menjadi sangat krusial untuk menjamin keselamatan tenaga kerja serta keberhasilan proyek secara keseluruhan. Peta Lokasi proyek dapat kita lihat pada gambar 1.1 dibawah ini :



Gambar 1.1. Peta Lokasi Proyek Pengendalian Banjir Batang Agam

Dari hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada proyek pembangunan pengendalian banjir batang Agam kota Payakumbuh (Tahap II) memiliki tingkat risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi karena melibatkan pekerjaan galian, alat berat, pekerjaan di area sungai, serta kondisi lingkungan kerja yang berbahaya, masih ditemukannya pekerja yang kurang disiplin dalam penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sehingga dapat meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan kerja di lokasi proyek, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek konstruksi sering kali belum berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur keselamatan kerja dapat menyebabkan terjadinya *unsafe action dan unsafe condition* di lingkungan proyek, ketersediaan sarana dan fasilitas keselamatan kerja pada proyek konstruksi terkadang belum memadai, seperti rambu-rambu K3, jalur evakuasi, kotak P3K, dan alat pemadam kebakaran, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman pekerja terhadap pentingnya budaya keselamatan kerja masih menjadi salah satu kendala dalam penerapan SMKK, aktivitas pekerjaan yang menggunakan alat berat dan pekerjaan di dekat aliran sungai memiliki potensi bahaya yang tinggi sehingga memerlukan pengendalian risiko yang baik. Proyek pembangunan pengendalian banjir Batang Agam Kota Payakumbuh Tahap II memerlukan evaluasi pelaksanaan SMKK agar dapat diketahui tingkat efektivitas penerapan keselamatan konstruksi di lapangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin membahasnya lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk laporan Teknik yang berjudul **“Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) Pada Proyek Pembangunan Pengendalian Banjir Batang Agam Kota Payakumbuh (Tahap II) Tahun 2025”**. Evaluasi terhadap penerapan SMKK diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan keselamatan kerja, mencegah kecelakaan kerja, serta menciptakan lingkungan kerja konstruksi yang aman, sehat, dan produktif. Hasil evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan dalam meningkatkan kinerja keselamatan kerja pada proyek konstruksi, sehingga dapat tercapai tujuan pembangunan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga aman dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam laporan teknik ini, adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek pembangunan pengendalian banjir Batang Agam Kota Payakumbuh Tahap II Tahun 2025?.
2. Apakah penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek telah sesuai dengan ketentuan dan standar keselamatan konstruksi yang berlaku?.
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek pembangunan pengendalian banjir Batang Agam?
4. Bagaimana upaya peningkatan efektivitas penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja pada proyek konstruksi tersebut?.

1.3 Etika Insinyur

1. Keinsinyuran : Kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
2. Insinyur : Seseorang yang mempunyai gelar profesi di bidang Keinsinyuran.
3. Program Profesi Insinyur : Program pendidikan tinggi setelah program sarjana untuk membentuk kompetensi Keinsinyuran.
4. Keselamatan dan Kesejahteraan publik : Insinyur harus memprioritaskan keselamatan, Kesehatan dan kesejahteraan Masyarakat dalam setiap Keputusan dan Tindakan professional mereka. Mereka harus memastikan bahwa proyek yang mereka kerjakan tidak membahayakan public dan berkontribusi bagi Masyarakat.
5. Kompetensi dan Profesionalisme : Insinyur harus mengembangkan kompetensinya melalui Pendidikan berkelanjutan dan pengalaman praktis. Insinyur harus melakukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan keahliannya, serta berusaha mencapai standar tertinggi dalam kualitas pekerjaannya.

6. Integritas dan Kejujuran : Insinyur harus bertindak dengan integritas dan kejujuran dalam semua aspek pekerjaannya. Ini termasuk memberikan laporan yang akurat, menghindari menyembunyikan informasi yang penting dan tidak melakukan Tindakan penipuan atau kecurangan.
7. Tanggungjawab terhadap lingkungan : Insinyur harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari proyek-proyek yang dilakukan dan berusaha untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. Insinyur harus merancang dan melaksanakan proyek dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
8. Kerahasiaan dan Privasi : Insinyur harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan tugasnya dan tidak menyalahgunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau merugikan pihak lain. Insinyur harus menghormati privasi klien dan rekan kerja.
9. Keadilan dan Non-Diskriminasi : Insinyur harus memperlakukan semua orang dengan adil dan tanpa diskriminasi. Insinyur harus memastikan bahwa kesempatan dan perlakuan yang adil diberikan kepada semua individu, terlepas dari ras, gender, agama atau latar belakang lainnya.
10. Kepatuhan terhadap Hukum dan Peraturan : Insinyur harus mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Insinyur harus mematuhi kode etik profesional dan standar industri yang relevan.
11. Keterlibatan dalam Komunitas Profesional : Insinyur harus berkontribusi pada pengembangan komunitas profesionalnya dengan berbagi pengetahuan, berpartisipasi dalam organisasi profesional, dan mendukung rekan kerja dalam pengembangan karir.

1.4 Tujuan Evaluasi

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada laporan teknik ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek pembangunan pengendalian banjir Batang Agam Kota Payakumbuh Tahap II Tahun 2025.

2. Untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dengan peraturan dan standar keselamatan konstruksi yang berlaku.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dalam upaya mencegah dan meminimalkan risiko kecelakaan kerja pada proyek pembangunan pengendalian banjir Batang Agam.
4. Untuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) pada proyek konstruksi sejenis di masa mendatang.

1.5 Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), batasan masalah pada laporan teknik ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian hanya dilakukan pada proyek pembangunan pengendalian banjir Batang Agam Kota Payakumbuh Tahap II Tahun 2025.
2. Evaluasi hanya dilakukan pada dokumen SMKK yang disusun oleh penyedia jasa untuk proyek pembangunan pengendalian banjir Batang Agam Kota Payakumbuh Tahap II Tahun 2025.
3. Penilaian hanya mencakup kepatuhan terhadap regulasi keselamatan konstruksi yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR sesuai dengan Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, tentang pedoman sistim manajemen keselamatan konstruksi.
4. Penelitian hanya meninjau penerapan keselamatan kerja pada tenaga kerja, pengawas, dan pihak pelaksana proyek yang terlibat langsung di lapangan.
5. Data penelitian diperoleh dari dokumen proyek, hasil observasi lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait proyek tanpa melakukan pengujian teknis di laboratorium atau simulasi resiko lanjutan.
6. Evaluasi dilakukan berdasarkan waktu periode penyusunan dan peninjauan lapangan dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) untuk tahun 2025, sehingga perubahan dokumen setelah peridoe evaluasi dilakukan tidak termasuk dalam analisis.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan laporan teknik ini yang disusun oleh penulis untuk memberikan gambaran yang jelas dan terstruktur mengenai evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, etika Insinyur, tujuan evaluasi, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan penjabaran teori yang berkaitan dengan proyek pembangunan pengendalian banjir untuk mendukung dalam penyelesaian masalah dan sebagai referensi dalam pembuatan laporan Teknik. Tinjauan Pustaka dilakukan berkaitan dengan kepatuhan internal dan fungsi penilaian dokumen sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK).

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang langkah-langkah sistematis dalam melakukan penilaian dokumen sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK). Langkah-langkah dimulai dengan tahapan pengumpulan data primer dan data skunder.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan dari penilaian dokumen sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) yang telah dilakukan pada proyek pembangunan pengendalian banjir.

BAB V : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisikan kesimpulan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan terhadap dokumen yang telah dilakukan dan rekomendasi untuk pelaksanaan evaluasi sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) yang telah dilakukan pada proyek pembangunan pengendalian banjir selanjutnya.